

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan adalah masalah struktural yang sampai saat ini terus menjadi fokus utama kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Menurut World Bank (2016), penduduk miskin secara global umumnya didominasi oleh masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, berusia relatif mudal, berpendidikan rendah, bekerja di sektor pertanian, serta berada dalam rumah tangga yang berukuran lebih besar dengan jumlah anak yang lebih banyak. Kemiskinan bukan hanya diartikan sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan rendahnya kualitas hidup secara keseluruhan. Kemiskinan saling berkaitan dengan berbagai aspek sosial dan ekonomi. Menurut Nafi'ah (2021) menjelaskan bahwa apabila tingginya angka kemiskinan mencerminkan banyaknya masyarakat yang belum mampu menjalani kehidupan dengan layak, artinya tingkat kesejahteraan masyarakat relatif rendah.

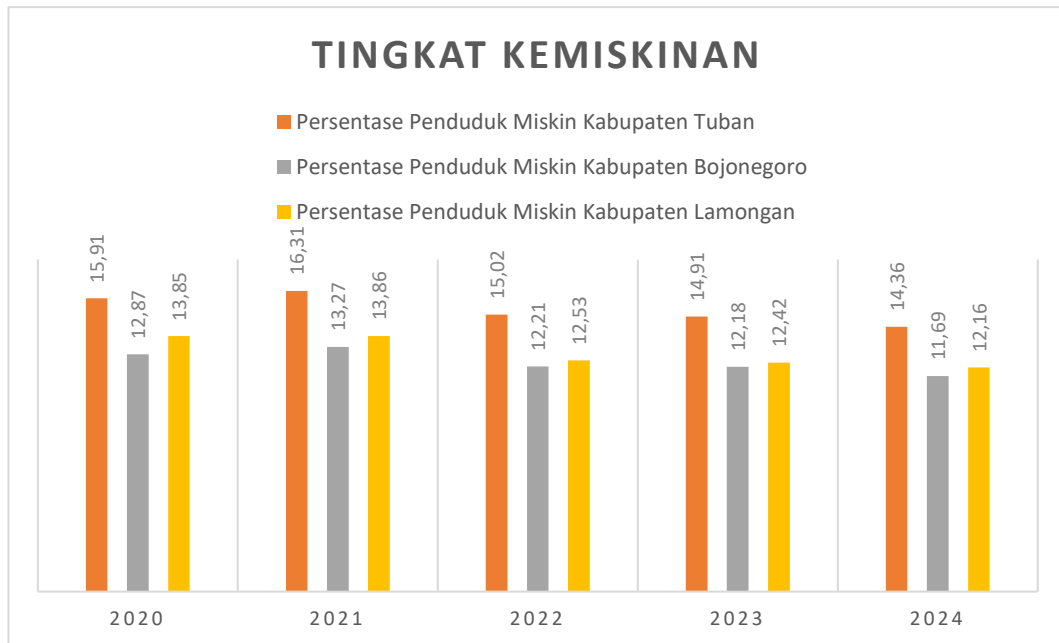
Suatu masyarakat dapat dikatakan makmur apabila mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengalami kekurangan (Sephia & Chandriyanti, 2024). Kemiskinan bersifat kompleks sehingga menempatkannya sebagai prioritas pembangunan yang terus diupayakan oleh pemerintah. Upaya yang dibuat pemerintah mencakup berbagai sektor, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis lokal. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan belum sepenuhnya dapat teratasi. Meskipun dalam beberapa periode terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, masih terdapat jutaan

masyarakat indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. kemiskinan bukan hanya dipicu oleh keterbatasan kepemilikan komoditas, tetapi juga oleh rendahnya kapasitas masyarakat dalam mengoptimalkan fungsi dan nilai guna dari komoditas yang dimiliki (Saputri et al., 2024). Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan (Forestri & Aprianti, 2024).

Pada konteks Pembangunan daerah, tingkat kemiskinan sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi menandakan bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lanjutan seperti meningkatnya pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan ketimpangan sosial dan ekonomi. Kemiskinan menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dasar (Mandey et al., 2023)

Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur masih menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius, meskipun Jawa Timur termasuk dalam salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi yang cukup berkembang. Pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan jasa di beberapa daerah telah mendorong peningkatan kinerja ekonomi daerah, namun dampaknya belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh kabupaten atau kota di Jawa Timur. Hal tersebut bisa dilihat dari masih adanya kesenjangan tingkat kemiskinan antar wilayah. Beberapa kabupaten menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang cukup baik, namun terdapat pula kabupaten yang secara konsisten dari tahun ke

tahun masih berada pada posisi dengan tingkat kemiskinan yang relatif tetap. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut disajikan grafik perkembangan tingkat kemiskinan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Pada gambar 1.1 diatas dapat dilihat perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan karena di pengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang menekan aktivitas ekonomi, meningkatkan pengangguran dan menurunkan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2022-2024 ketiga Kabupaten tersebut menunjukkan tren penurunan yang konsisten karena adanya pemulihan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial ekonomi Masyarakat. Kabupaten Tuban dengan Tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan. Padahal Kabupaten Tuban

dikenal sebagai kampung miliarder dan memiliki potensi yang kuat untuk bersaing, namun faktanya masih termasuk dalam kelompok lima besar dengan Tingkat kemiskinan tertinggi provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan secara menyeluruh belum tentu mencerminkan perbaikan yang merata di seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban menunjukkan tren penurunan, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan pengentasan kemiskinan mengingat tingkatnya masih relatif tinggi (Pradita & Riyanto, 2021).

Karakteristik daerah – daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Timur ini cukup beragam, ada daerah yang memang kekurangan sumber daya, namun ada daerah yang sebenarnya memiliki potensi ekonomi luar biasa namun angka kemiskinannya sulit ditekan. Kemiskinan bukan hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga terjadi ketimpangan struktural dalam pembangunan (Panggabean et al., 2025). Permasalahan kemiskinan ini dapat dilihat bagaimana sebuah wilayah mengelola kekayaan daerahnya agar berdampak langsung pada kesejahteraan Masyarakat paling bawah. Dibandingkan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup menjajikan dan memiliki modal ekonomi yang sangat besar. Kekayaan alamnya yang melimpah telah melahirkan sektor industri berskala besar, mulai dari indsutri semen hingga proyek strategis nasional seperti pembangunan kilang minyak. Selain itu potensi di sektor pertanian dan perdagangan juga terus menunjukkan perkembangan yang pesat.

Keberadaan potensi ekonomi yang begitu besar ini seolah menciptakan dua wajah yang berbeda di Kabupaten Tuban. Di satu sisi, daerah ini menjadi magnet

investasi dan pertumbuhan industri yang pesat, namun di sisi lain, data statistik secara konsisten menempatkan Kabupaten Tuban dalam daftar Kabupaten dengan angka kemiskinan yang relatif tinggi di Provinsi Jawa Timur. Bertolak belakang antara kemajuan industri dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum optimal. Salah satu cara untuk keluar dari kemiskinan adalah melalui pendidikan. Orang yang hidup dalam kemiskinan umumnya berharap memperoleh pekerjaan yang layak dengan pendapatan yang tinggi, namun pendidikan tinggi sering kali hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang baik (Boari et al., 2024)

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan (Kasih, 2025). Investasi pada modal manusia menunjukkan manfaat yang lebih nyata (Jannah & Indah Fitriana Sari, 2023). Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, IPM pada tahun 2024 tercatat sebesar 72,31 yang dibandingkan tahun 2023 sebesar 71,40. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Tuban mengalami kemajuan yang cukup baik dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak masyarakat. Indeks Pembangunan manusia Kabupaten Tuban terus mengalami peningkatan, namun kondisi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi di bandingkan dengan Kabupaten lain yang memiliki potensi hampir serupa.

Kabupaten Tuban memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Menurut BPS, pada tahun 2024 struktur perekonomian Kabupaten Tuban masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 30,2% diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang 18,35%, sektor perdagangan besar dan eceran serta retribusi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi sebesar 14,75%, kemudian konstruksi sebesar 11,28% dan sektor pertambangan dan penggalan berkontribusi sebesar 8,85 serta sektor informasi dan komunikasi sebesar 5,48% terhadap perekonomian Kabupaten Tuban. Namun, apabila peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak sejalan seiring dengan perkembangan sektor-sektor tersebut, maka pertumbuhan ekonomi yang terjadi cenderung tidak optimal atau kurang inklusif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban pernah menjadi pertumbuhan tertinggi se Jawa Timur mencapai 8,88%. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik, hal itu belum tentu efektif menurunkan angka kemiskinan apabila tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan (Triwulandari et al., 2023)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu secara otomatis membuka banyak lapangan pekerjaan. Masih banyak masyarakat yang menganggur karena kurangnya lapangan pekerjaan sehingga membuat masyarakat tersebut tidak memiliki pendapatan. Rendahnya pendapatan rumah tangga, mengurangi akumulasi tabungan dan menghambat investasi dan dari keterbatasan investasi tersebut dapat menimbulkan keterbelakangan yang berkelanjutan (Malida & Sumanto, 2024). Kabupaten Tuban memiliki sektor basis, yaitu industri pengolahan, pertanian, dan pertambangan/penggalan yang memiliki peran dalam penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi. Kondisi pengangguran

Kabupaten Tuban sebesar 4,81 tahun 2020, menjadi 4,68% tahun 2021, 4,54% tahun 2022, 4,40% tahun 2023, dan 4,28% tahun 2024, Penurunan tingkat pengangguran ini mencerminkan bertambahnya kesempatan kerja.

Penurunan angka pengangguran tampaknya sejalan dengan penurunan kemiskinan Kabupaten Tuban. Namun, penurunan tersebut belum cukup menggeser posisi Kabupaten Tuban dari posisi tertinggi yang dibandingkan dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro serta daerah dengan peringkat lima tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Apabila pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh sektor sektor yang padat modal dan kurang menyerap tenaga kerja, maka dampaknya terhadap penurunan pengangguran cenderung terbatas dan membuat penduduk miskin berpendapatan rendah.

Berdasarkan seluruh uraian permasalahan dan kondisi yang telah ditemukan, terdapat urgensi akademis dan kebijakan yang kuat untuk mengkaji secara kuantitatif pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tuban. Penetapan periode penelitian 2010-2024 dilandasi oleh pertimbangan bahwa waktu tersebut menggambarkan dinamika sosial dan ekonomi yang cukup menyeluruh, mencakup fase sebelum pandemi, kontraksi akibat krisis Covid-19, serta tahap pemulihan setelahnya, sehingga menyediakan keragaman data yang cukup untuk menghasilkan estimasi yang lebih akurat. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai mekanisme pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kondisi kemiskinan di Kabupaten Tuban, serta menjadi masukan berbasis bukti yang bernilai bagi Pemerintah Kabupaten Tuban dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia,

perluasan kesempatan kerja, dan strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemerataan dan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan. Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, penelitian ini mengangkat judul **”Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tuban”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Tuban?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Tuban?
3. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Tuban?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Tuban
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Tuban
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Tuban

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS Kabupaten Tuban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Kabupaten Tuban. Variabel independen dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka, sedangkan variabel dependen adalah tingkat kemiskinan. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen serta pengaruh simultan ketiganya terhadap variabel dependen, sekaligus menilai besaran kontribusi tiap variabel terhadap variasi tingkat kemiskinan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan analisis kemiskinan di tingkat kabupaten yang masih relatif terbatas. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi selanjutnya mengenai dinamika kemiskinan di wilayah berbasis industri dengan potensi ekonomi yang besar namun masih menghadapi permasalahan ketimpangan kesejahteraan, khususnya Kabupaten Tuban.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kabupaten Tuban, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait peningkatan kualitas pendidikan, penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan perluasan kesempatan kerja sebagai upaya penanggulan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Bagi pemangku kepentingan dan pelaku usaha, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang strategi investasi dan pengembangan usaha yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah sekaligus contoh penerapan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dalam analisis kemiskinan berbasis data *time-series* pada tingkat kabupaten.